
Problematika Administrasi Dapodik dalam Penguatan Kelembagaan PAUD

Mila Fitria Amanda

Pendidikan Non Formal Universitas Negeri Padang Indonesia

Email: Fitriaamandamil@gmail.com

Abstract. This study examines the administrative problems in managing the Education Data System (Dapodik) as a key instrument for strengthening the institutional capacity of Early Childhood Education (PAUD) in West Sumatra. Using a literature review approach, data were collected from various sources, including reports from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek), BAN PAUD and PNF, and previous studies. The findings reveal that although Dapodik reporting in West Sumatra has reached 97.8%, several challenges persist, such as limited internet access, low operator competence, insufficient technical supervision, and a lack of institutional awareness of data accuracy. These issues have led to delays in accreditation, misallocation of operational assistance funds (BOP), and ineffective educational planning. Therefore, innovative solutions such as Dapodik gamification, digital inter-institutional mentoring, and operator certification are recommended to improve data management effectiveness and sustainably strengthen PAUD institutional governance.

Keywords: Dapodik, educational administration, PAUD institutional management, data management, West Sumatra.

Abstrak. Penelitian ini membahas problematika administrasi dalam pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai instrumen utama penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Barat. Melalui pendekatan studi pustaka, data diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan Kemendikbudristek, BAN PAUD dan PNF, serta penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tingkat pelaporan Dapodik PAUD di Sumatera Barat telah mencapai 97,8%, masih terdapat kendala signifikan seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya kompetensi operator, minimnya supervisi teknis, dan kurangnya kesadaran lembaga terhadap pentingnya data akurat. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan akreditasi, penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), serta perencanaan program pendidikan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif seperti gamifikasi Dapodik, mentoring digital antar-lembaga, dan sertifikasi operator guna meningkatkan efektivitas pengelolaan data serta memperkuat tata kelola kelembagaan PAUD secara berkelanjutan.

Kata kunci: Dapodik, administrasi pendidikan, kelembagaan PAUD, pengelolaan data, Sumatera Barat.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di masa depan. Lembaga PAUD tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermain dan belajar, tetapi juga sebagai wadah stimulasi seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Agar layanan berjalan optimal, lembaga PAUD membutuhkan sistem pengelolaan kelembagaan yang tertata, salah satunya melalui pemutakhiran data yang akurat, lengkap, dan berkelanjutan. Masa usia dini merupakan periode emas (Golden Age) yang sangat menentukan arah tumbuh kembang anak, ditandai dengan pesatnya perkembangan motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, moral, dan kepribadian. Hurlock (2015) dan Santrock (2018) menegaskan bahwa tahap kanak-kanak awal menjadi fondasi bagi perkembangan individu di masa dewasa. Ismaniar (2018) serta Lili Dasa Putri dkk. (2024) menambahkan

bahwa stimulasi pendidikan yang terarah, kerja sama keluarga, dan dukungan lembaga PAUD merupakan unsur kunci untuk memastikan perkembangan anak berlangsung optimal.

Dalam konteks manajemen kelembagaan, pengelolaan administrasi memegang peranan penting dalam menjamin mutu penyelenggaraan PAUD. Mulyasa (2017) menyatakan bahwa administrasi pendidikan yang efektif akan mendukung keseluruhan proses layanan, termasuk perencanaan, evaluasi, dan monitoring program. Salah satu instrumen administratif terpenting adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yaitu sistem pendataan nasional resmi yang digunakan pemerintah untuk memotret kondisi riil lembaga dan menjadi dasar penyaluran bantuan, perencanaan kebijakan, serta proses akreditasi. Panduan Dapodik PAUD dan Dikmas Kemendikbudristek (2023) menegaskan bahwa akurasi dan kelengkapan Dapodik memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan layanan dan mutu kelembagaan PAUD maupun KB.

Di Provinsi Sumatera Barat, laporan Dapodik menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Berdasarkan Rekapitulasi Data Dapodik Kemendikbudristek tahun 2024, dari 1.547 lembaga PAUD dan KB yang tercatat, sebanyak 1.513 lembaga (97,80%) telah mengirimkan data lengkap. Namun demikian, masih terdapat 34 lembaga yang belum melakukan sinkronisasi, terutama pada wilayah dengan akses internet terbatas seperti Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, dan Pasaman Barat. Meskipun sebagian besar daerah telah mencapai sinkronisasi penuh, kesenjangan ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas administrasi antar wilayah. Beberapa kendala yang muncul mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis penginputan, kualitas jaringan internet yang tidak merata, perubahan format Dapodik yang cukup sering, serta kurangnya pendampingan teknis berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan ketidakakuratan data dan keterlambatan sinkronisasi, yang pada akhirnya memengaruhi penyaluran BOP, proses akreditasi, serta perencanaan program pengembangan lembaga.

Fenomena tersebut menggambarkan adanya *gap* atau kesenjangan antara tuntutan kebijakan Dapodik yang menuntut akurasi dan keberlanjutan data, dengan kemampuan lembaga PAUD dan KB dalam mengelola administrasi secara efektif. Padahal, data Dapodik menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sebagaimana ditegaskan oleh Wahyuni & Firmansyah (2021). Ketika data tidak diperbarui secara rutin, lembaga berisiko kehilangan hak menerima bantuan operasional, mengalami kendala akreditasi, serta kehilangan peluang peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah daerah kesulitan merancang kebijakan yang tepat sasaran karena tidak memperoleh data riil mengenai kondisi satuan PAUD di wilayahnya.

Konteks permasalahan ini menegaskan bahwa pengelolaan Dapodik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tata kelola kelembagaan yang menentukan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami problematika administrasi Dapodik pada lembaga PAUD dan KB di Sumatera Barat. Kajian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kendala utama, memetakan faktor penyebab ketidakoptimalan sinkronisasi, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung kelancaran administrasi dan penguatan kelembagaan PAUD serta KB. Dengan adanya kajian ini, diharapkan peningkatan mutu tata kelola lembaga dapat tercapai secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Sumatera Barat.

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi Pendidikan pada Lembaga PAUD dan KB

Administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses pengelolaan pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Engkoswara & Komariah (2010) menegaskan bahwa administrasi yang baik memastikan setiap aspek pendidikan berjalan teratur, mulai dari pengelolaan peserta didik, pendidik, hingga sarana prasarana. Hal ini dipertegas oleh Mulyasa (2017) bahwa keteraturan administrasi menjadi syarat mutlak agar lembaga pendidikan mampu memberikan layanan yang konsisten dan bermutu.

Dalam konteks Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), administrasi berfungsi sebagai fondasi keberlangsungan layanan pendidikan, baik di Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS). Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 menegaskan bahwa manajemen PAUD yang efektif mencakup pengelolaan kelembagaan, tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, serta sarana prasarana pendukung. Artinya, mutu layanan PAUD tidak hanya ditentukan oleh interaksi guru-anak, tetapi juga ditopang oleh tata kelola administrasi yang sistematis.

Seiring perkembangan zaman, administrasi pendidikan semakin dituntut untuk menyesuaikan diri dengan era digital. Sari & Hidayat (2022) menjelaskan bahwa penguatan administrasi berbasis teknologi merupakan kebutuhan mendesak agar lembaga PAUD mampu bekerja lebih efisien dalam pencatatan data, transparansi laporan, serta akurasi perencanaan program. Senada dengan itu, Rahayu & Pratama (2021) menemukan bahwa pemanfaatan sistem administrasi daring seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terbukti berperan penting

dalam memperlancar akreditasi lembaga serta mempercepat penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).

Fitriani (2020) menambahkan bahwa administrasi yang tertata rapi berdampak langsung pada mutu layanan PAUD. Ketika data peserta didik, tenaga pendidik, dan program tercatat dengan baik, maka pendidik dapat lebih fokus pada proses pembelajaran, sementara pengelola dapat mengambil keputusan berdasarkan data aktual (evidence-based decision making). Hal ini diperkuat oleh Pratomo (2023) yang menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan administrasi, khususnya dalam pelaporan Dapodik, sering kali menjadi penghambat akreditasi dan mengurangi peluang lembaga memperoleh dukungan program pemerintah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa administrasi pendidikan bukan sekadar kegiatan teknis pencatatan, tetapi merupakan komponen strategis yang menentukan mutu kelembagaan PAUD. Administrasi yang dikelola secara sistematis dan berbasis teknologi akan memperkuat keberlangsungan layanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjamin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu.

kelembagaan PAUD dan KB

Kelembagaan PAUD dan KB merupakan sistem yang mengatur seluruh komponen lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini agar mampu memberikan layanan yang optimal dan berkelanjutan. Depdikbud (2014) menegaskan bahwa kelembagaan PAUD yang baik harus memenuhi standar nasional, mulai dari aspek pengelolaan, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga sistem evaluasi. Lembaga yang kokoh ditandai dengan kepatuhan terhadap standar nasional PAUD, tata kelola yang transparan, serta kelengkapan data administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, BAN PAUD dan PNF (2023) menjelaskan bahwa akreditasi menjadi instrumen penting untuk menilai kualitas kelembagaan. Melalui akreditasi, setiap satuan PAUD dan KB dievaluasi secara menyeluruh, mencakup mutu layanan pembelajaran, manajemen, dan kesiapan sarana prasarana. Lembaga yang berhasil memperoleh peringkat akreditasi tinggi umumnya menunjukkan keteraturan administrasi dan keberhasilan dalam memenuhi standar mutu pendidikan anak usia dini.

Dalam perkembangannya, penelitian terbaru menegaskan bahwa kelembagaan PAUD yang kuat tidak hanya bergantung pada aspek formal kepatuhan standar, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap tantangan zaman. Rahayu & Pratama (2021) menyoroti bahwa digitalisasi administrasi dan keterbukaan informasi publik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga PAUD. Hal ini sejalan dengan temuan Sari & Hidayat (2022) yang menyatakan bahwa tata kelola kelembagaan berbasis teknologi mempermudah proses

pelaporan, mempercepat akreditasi, serta meningkatkan akses pendidik pada program pelatihan berbasis kebutuhan nyata.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada PAUD dan KB

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan sistem pendataan resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk menghimpun seluruh data pendidikan di Indonesia. Dapodik PAUD dan Dikmas mencatat informasi mengenai kelembagaan, peserta didik, pendidik, dan sarana prasarana (Kemendikbudristek, 2023).

- 1 . Kelengkapan dan akurasi data Dapodik sangat penting karena menjadi dasar untuk:
- 2 . Penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD.
- 3 . Proses akreditasi lembaga (BAN PAUD dan PNF, 2023).
- 4 . Penyusunan kebijakan peningkatan mutu layanan (Kemendikbudristek, 2024).

Kendala dalam pengelolaan Dapodik sering terjadi di wilayah yang akses internetnya terbatas atau operator sekolahnya belum terlatih optimal (Rahmawati, 2022). di lapangan masih banyak kendala yang membuat pengelolaan Dapodik belum optimal. Akses internet yang terbatas di daerah tertentu, minimnya pelatihan bagi operator sekolah, hingga rendahnya kesadaran pentingnya pembaruan data menjadi tantangan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital di lembaga PAUD menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai Dapodik dalam makalah ini sangat penting untuk dibaca. Melalui pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan para pengelola PAUD semakin sadar bahwa kualitas data menentukan kualitas kebijakan dan pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan anak usia dini di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Studi pustaka atau *library research* adalah metode penelitian yang dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, artikel ilmiah, peraturan perundangan, maupun dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zed (2018),studi pustaka merupakan cara yang sistematis untuk memperoleh landasan teoritis dan memperkuat argumentasi dengan menelaah literatur yang sudah ada. Senada dengan itu,Sudiyono(2022) menjelaskan bahwa studi pustaka berfungsi untuk membangun kerangka berpikir yang kokoh,sekaligus mempertemukan teori dengan fakta empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Administrasi dalam Pengelolaan Dapodik

Meski capaian pelaporan cukup tinggi, masih terdapat wilayah di Sumatera Barat yang belum mencapai 100% kelengkapan data. Berdasarkan rekapitulasi Kemendikbudristek 2024, daerah dengan tingkat pengiriman data belum sempurna adalah:

- Kota Padang (96% – 2 lembaga belum mengirim)
- Pesisir Selatan (96% – 5 lembaga)
- Kabupaten Solok (97% – 4 lembaga)
- Kabupaten Solok Selatan (97% – 1 lembaga)
- Kabupaten Agam (97% – 2 lembaga)
- Padang Pariaman (98% – 2 lembaga)
- Kota Pariaman (98% – 1 lembaga)
- Kabupaten Pasaman (98% – 3 lembaga)
- Kabupaten Pasaman Barat (95% – 1 lembaga)
- Kabupaten Dharmasraya (89% – 12 lembaga)
- Kepulauan Mentawai (83% – 1 lembaga)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar lembaga PAUD dan KB di Sumatera Barat telah mampu mengelola data Dapodik dengan baik, masih terdapat kesenjangan yang tidak boleh diabaikan. Mulyasa (2019) menegaskan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan ditopang oleh tiga aspek utama: kompetensi administrasi, ketersediaan sarana, dan efektivitas supervisi. Ketika salah satu dari unsur tersebut lemah, maka kualitas layanan pendidikan akan ikut terdampak.

Seperti dalam praktiknya, masih banyak lembaga PAUD di Sumatera Barat yang menghadapi hambatan dalam mengelola data Dapodik secara optimal. Misalnya, PAUD Citra Bunda di Kabupaten Solok mengalami keterlambatan penginputan data karena jaringan internet yang tidak stabil dan operator sekolah yang belum mendapatkan pelatihan teknis secara memadai. Akibatnya, lembaga tersebut sempat tertunda dalam menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD tahun 2023, serta mengalami hambatan dalam proses verifikasi akreditasi oleh BAN PAUD dan PNF.

Kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan administrasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga berdampak langsung pada mutu layanan terhadap anak usia dini. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan pemerataan infrastruktur digital, agar semua lembaga PAUD di Sumatera Barat dapat menjalankan sistem Dapodik secara optimal.

Hasil rekapitulasi Dapodik tahun 2024 memperlihatkan bahwa beberapa daerah seperti Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan belum mampu mencapai pelaporan data 100%. Di balik angka-angka ini tersimpan persoalan mendasar yang berlapis

1. Keterbatasan Jaringan Internet

Akses internet yang tidak stabil, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan, sering membuat operator kesulitan menyinkronkan data. Situasi ini berdampak pada kelambatan pembaruan informasi penting tentang peserta didik maupun lembaga.

2. Kompetensi Operator yang Belum Merata

Tidak semua lembaga memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam mengoperasikan aplikasi Dapodik. Akibatnya, input data kerap tidak lengkap atau keliru, dan berimplikasi langsung pada keakuratan laporan.

3. Minimnya Supervisi dan Pendampingan Teknis

Lembaga yang menghadapi hambatan sering tidak memperoleh pendampingan intensif dari dinas pendidikan. Padahal, teori supervisi pendidikan menekankan bahwa bimbingan sistematis mampu meningkatkan profesionalisme staf administrasi.

4. Keterbatasan Sarana dan Perangkat

Di beberapa PAUD dan KB, komputer, laptop, bahkan aliran listrik yang memadai masih menjadi kemewahan. Ketiadaan sarana ini menghambat kelancaran pengelolaan data.

Permasalahan tersebut bukan sekadar soal teknis, melainkan berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan dan mutu kelembagaan. Data yang tidak lengkap dapat menghambat pencairan BOP, memperlambat proses akreditasi, bahkan membuat perencanaan peningkatan mutu menjadi tidak tepat sasaran. Fakta ini memperlihatkan bahwa administrasi Dapodik bukan hanya urusan pelaporan rutin, melainkan fondasi yang menentukan arah penguatan lembaga PAUD dan KB.

Maka, pembahasan mendalam mengenai persoalan ini menjadi penting: bagaimana memastikan bahwa setiap lembaga, dari pusat kota hingga pelosok Mentawai, memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan Dapodik secara optimal. Dengan mengurai masalah hingga ke akarnya, makalah ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan rekomendasi yang aplikatif agar kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Sumatera Barat dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan.

Keterlambatan atau kelalaian desa maupun lembaga pendidikan dalam melakukan penginputan data menimbulkan dampak signifikan terhadap sistem manajemen pendidikan dan

pembangunan wilayah. Ketidaklengkapan data mengakibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program tidak berjalan secara optimal karena kehilangan dasar informasi yang valid. Data sejatinya berfungsi sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan, baik terkait penyediaan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pemetaan peserta didik. Lembaga yang tidak aktif dalam pelaporan data juga berisiko kehilangan peluang mendapatkan bantuan pemerintah, mengingat kebijakan berbasis data kini menjadi acuan utama dalam penyaluran program. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran terhadap pentingnya tata kelola berbasis data yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang administrasi serta penguatan supervisi internal menjadi langkah strategis untuk mewujudkan manajemen pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

Peran Dapodik dalam Mendukung Penguatan Kelembagaan PAUD dan KB di Sumatera Barat

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem pendataan pendidikan nasional yang diatur melalui Permendikbud No. 79 Tahun 2015. Sistem ini menjadi sumber utama bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi layanan pendidikan. Menurut pandangan Mulyasa (2017), administrasi pendidikan yang efektif harus berbasis pada data yang akurat agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks PAUD dan Kelompok Bermain (KB), Dapodik memastikan data lembaga, peserta didik, dan tenaga pendidik terdokumentasi dengan baik, sehingga mempermudah penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), proses akreditasi, dan penyusunan kebijakan peningkatan mutu.

Dalam konteks Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kelompok Bermain (KB), keberadaan Dapodik sangat strategis. Sistem ini tidak hanya mencatat identitas lembaga, jumlah peserta didik, dan tenaga pendidik, tetapi juga memastikan tersedianya data yang akurat untuk berbagai keperluan seperti akreditasi, penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), hingga penyusunan program peningkatan mutu lembaga.

Menurut teori Manajemen Berbasis Data (Data-Based Management), keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam menyusun kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas dan kelengkapan data yang dimilikinya. Datnow & Hubbard (2019) menegaskan bahwa pengambilan keputusan berbasis data memungkinkan lembaga pendidikan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, karena didasarkan pada kondisi riil yang terukur, bukan sekadar asumsi. Hal ini sejalan dengan pandangan Wayman & Jimerson (2022) yang menyatakan bahwa data berperan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan akuntabilitas,

memperkuat transparansi, dan memastikan keberlanjutan mutu pendidikan. Secara konseptual, penerapan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat dikaitkan dengan teori Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (*Educational Management Information System/EMIS*) yang menekankan pentingnya data terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis (Siagian, 2012). Dalam konteks PAUD, Dapodik menjadi manifestasi nyata dari teori ini karena membantu lembaga menyediakan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Hal ini juga sejalan dengan teori Manajemen Pendidikan Modern (Terry, 2014) yang menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan data yang valid.

Lebih jauh, dalam konteks PAUD, Sari & Hidayat (2022) menunjukkan bahwa administrasi berbasis teknologi digital seperti Dapodik terbukti mampu meningkatkan efisiensi tata kelola lembaga sekaligus mempercepat proses akreditasi. Artinya, Dapodik tidak hanya sebatas alat pendataan, tetapi juga instrumen manajerial yang menentukan arah pengembangan kelembagaan. Selain itu, teori transparansi dan akuntabilitas publik (*Lodge & Hood, 2019*) juga memperkuat urgensi penerapan Dapodik. Melalui data yang terbuka dan dapat diverifikasi, lembaga PAUD menunjukkan tanggung jawab publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pengelolaannya.

Urgensinya, tanpa data yang lengkap dan akurat, PAUD dan KB akan kesulitan mengakses bantuan pemerintah, terhambat dalam proses akreditasi, serta gagal merancang program pengembangan mutu yang sesuai kebutuhan anak. Oleh karena itu, pemanfaatan Dapodik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak (*urgent need*) bagi lembaga pendidikan anak usia dini untuk tetap eksis, kompetitif, dan dipercaya masyarakat.

Di Provinsi Sumatera Barat, rekapitulasi Dapodik tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total 1.547 lembaga PAUD dan KB, sebanyak 1.513 lembaga (97,8%) telah melengkapi dan mengirimkan datanya secara tepat waktu. Capaian ini mengindikasikan kesadaran lembaga terhadap pentingnya pengelolaan administrasi digital sudah cukup baik. Lembaga yang konsisten melaporkan data secara lengkap terbukti lebih mudah memperoleh dukungan program, meningkatkan akreditasi sesuai standar, serta merancang pengembangan berbasis bukti *Evidence-based planning* adalah pendekatan penyusunan program dan kebijakan dengan mendasarkan keputusan pada data atau bukti yang valid dan terukur, bukan hanya perkiraan atau asumsi.

Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Dapodik telah berperan sebagai instrumen penguatan kelembagaan, karena:

1. Memberikan kepastian data yang valid untuk dasar penetapan kebijakan daerah.
2. Mempermudah pengelolaan bantuan dana seperti BOP PAUD dan KB.
3. Menjadi indikator kesiapan lembaga dalam mengikuti proses akreditasi yang menuntut transparansi administrasi.
4. Membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melakukan evaluasi mutu layanan PAUD dan KB secara sistematis dengan kata lain, semakin baik kualitas data Dapodik yang dikirimkan lembaga, semakin besar peluang lembaga tersebut memperkuat eksistensi dan mutu pelayanannya.

Dalam upaya memperkuat kelembagaan PAUD, diperlukan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya dari pengelola lembaga, tetapi juga dari keluarga peserta didik. Menurut Putri, Rozi, Handrianto, dan Rahman (2024), kemitraan antara keluarga dan lembaga PAUD melalui *model family partnership* berbasis teknologi merupakan strategi efektif dalam mendukung pengembangan potensi anak sekaligus memperkuat manajemen lembaga. Melalui kolaborasi ini, keluarga berperan aktif dalam memberikan data perkembangan anak secara berkala, yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam sistem Dapodik. Integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan keakuratan data, tetapi juga menjadikan Dapodik sebagai instrumen yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, penguatan administrasi Dapodik tidak semata menjadi tanggung jawab lembaga, melainkan hasil kerja sama antara lembaga, keluarga, dan pemerintah dalam menciptakan layanan PAUD yang lebih berkualitas dan berbasis bukti.

Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, Dapodik tidak hanya berfungsi sebagai alat pendataan administratif, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam mewujudkan transparansi dan peningkatan mutu layanan PAUD. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana implementasi Dapodik di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, guna melihat sejauh mana sistem ini berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan PAUD dan KB di lapangan.

Meskipun demikian, kesadaran lembaga-lembaga PAUD di Sumatera Barat untuk mengirimkan data tepat waktu merupakan langkah maju yang menunjukkan bahwa budaya manajemen berbasis bukti (*evidence-based culture*) mulai terbentuk. Ke depan, penguatan Dapodik sebaiknya difokuskan pada peningkatan kompetensi operator, integrasi data antar-lembaga dan keluarga, serta supervisi berjenjang dari dinas pendidikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dapodik bukan hanya menjadi sistem pendataan administratif, melainkan instrumen strategis dalam menciptakan layanan PAUD yang transparan, berkualitas, dan akuntabel.

Dampak Kendala Administrasi terhadap Keberlangsungan dan Mutu Kelembagaan

Kendala administrasi yang tidak segera diatasi membawa konsekuensi serius terhadap keberlangsungan dan mutu kelembagaan PAUD dan KB. Tilaar (2000) dalam Teori Sistem Pendidikan menegaskan bahwa data yang valid merupakan prasyarat utama bagi sistem pendidikan yang berkualitas. Tanpa basis data yang lengkap, setiap kebijakan dan keputusan berisiko kehilangan akurasi, sehingga lembaga tidak dapat memberikan layanan optimal bagi anak usia dini.

Menurut Rochmad (2021) dalam Manajemen Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0, lembaga pendidikan, termasuk PAUD, dituntut untuk mampu menerapkan sistem administrasi berbasis data digital agar efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Haryati dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa manajemen administrasi berbasis teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu layanan PAUD, karena mempermudah pemantauan perkembangan anak, pelaporan kegiatan, serta koordinasi antarpendidik dan orang tua.oik44

Berbagai dampak yang muncul dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Proses Akreditasi Terhambat

Akreditasi adalah tolok ukur resmi mutu lembaga. Ketika data dalam Dapodik tidak mutakhir atau tidak lengkap, asesor kesulitan menilai kesesuaian antara profil lembaga dan kenyataan di lapangan. Akibatnya, banyak lembaga harus menunda pengajuan akreditasi atau menerima hasil yang kurang maksimal, sehingga reputasi dan kepercayaan masyarakat pun dapat terganggu.

2. Penyaluran Dana BOP yang Tertunda atau Tidak Tepat Sasaran

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sangat bergantung pada data peserta didik dan kondisi lembaga yang tercatat dalam sistem. Ketidakakuratan data membuat alokasi dana menjadi tidak sesuai kebutuhan: ada lembaga yang menerima lebih sedikit dari yang semestinya, sementara yang lain justru kelebihan anggaran tanpa perencanaan matang. Kondisi ini bisa menghambat kelancaran operasional dan kesejahteraan guru.

3. Perencanaan Fasilitas dan Program Pembelajaran yang Kurang Akurat

Data Dapodik bukan hanya catatan administratif, melainkan peta kebutuhan lembaga. Ketika data tentang jumlah peserta didik, kondisi sarana, dan profil guru tidak lengkap, pemerintah daerah maupun pengelola lembaga kesulitan menyusun rencana pengadaan

fasilitas, pelatihan guru, maupun inovasi pembelajaran. Akhirnya, investasi pendidikan menjadi tidak tepat sasaran.

4. Hambatan dalam Akses Pelatihan dan Dukungan Berbasis Kebutuhan

Guru dan pengelola memerlukan pelatihan yang sesuai dengan kondisi nyata lembaga. Namun, jika data tentang kompetensi dan kebutuhan guru tidak tercatat dengan baik, pelatihan yang diberikan cenderung bersifat umum, tidak menyentuh akar masalah di lapangan. Dukungan teknis pun menjadi kurang efektif karena tidak berbasis bukti yang jelas.

Kendala-kendala di atas tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh inti pelayanan pendidikan anak usia dini. Mutu interaksi belajar, kenyamanan lingkungan, dan ketersediaan fasilitas akan ikut terpengaruh bila kebijakan tidak didukung data yang sahih. Pada akhirnya, anak-anak yang seharusnya menjadi pusat perhatian justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada aspek teknis pengisian Dapodik, tetapi juga pada kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya akuntabilitas data. Banyak lembaga yang masih memandang Dapodik sebatas kewajiban administratif, bukan sebagai alat manajerial yang menentukan arah kebijakan mutu. Padahal, seperti ditegaskan oleh Mulyasa (2019), keberhasilan manajemen pendidikan sangat bergantung pada kemampuan lembaga mengolah data menjadi dasar pengambilan keputusan yang rasional dan terukur.

Dengan demikian, upaya peningkatan mutu kelembagaan PAUD dan KB harus dimulai dari perubahan paradigma: data bukan sekadar laporan, tetapi fondasi utama dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga. Dapodik yang dikelola secara profesional akan memperkuat tata kelola lembaga, menjamin pemerataan layanan, serta memastikan bahwa setiap anak usia dini mendapatkan hak pendidikan yang bermutu.

Rekomendasi Solusi Langkah-Langkah Perbaikan pengelolaan Dapodik lebih efektif.

Sebagai penulis, setelah mengkaji berbagai teori, data lapangan, dan pendapat para ahli, saya menyadari bahwa pengelolaan Dapodik di PAUD dan KB memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga kreatif dan kontekstual. Permasalahan administrasi yang telah diuraikan sebelumnya menuntut langkah baru yang mampu menembus batas kebiasaan umum.

Dalam bagian ini, saya tidak sekadar menyampaikan saran yang bersifat umum seperti pelatihan atau penambahan sarana, melainkan menawarkan solusi inovatif yang dirancang agar relevan dengan karakteristik Sumatera Barat baik dari segi geografis, sosial, maupun budaya. Harapannya, solusi berikut dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah, pengelola lembaga,

dan masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem data yang lebih kokoh, efektif, dan berpihak pada mutu layanan bagi anak usia dini.

saya memberi 5 solusi menarik yang menurut saya dapat diterapkan untuk mengatasi kendala pengelolaan Dapodik pada PAUD dan KB yang sampai saat ini belum bisa dipecahkan masalah nya saya harap dengan Solusi yang saya berikan iini bisa ibuk/bapak pakai untuk mengatasi permasalahan Dapodik.

1 . Gamifikasi Dapodik Gamifikasi Dapodik adalah inovasi penerapan prinsip permainan (game elements) pada proses pengisian dan sinkronisasi data Dapodik di PAUD dan KB. Konsep ini menjadikan tugas administrasi yang biasanya terasa membosankan menjadi lebih menarik dengan adanya poin, level, badge, dan hadiah tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi operator agar lebih konsisten memperbarui data secara lengkap dan tepat waktu.

Membuat pengisian Dapodik terasa seperti permainan yang menyenangkan.

Cara Pakai & Mekanisme:

Dinas Pendidikan membuat dashboard khusus yang menampilkan progres sinkronisasi setiap PAUD/KB di kabupaten/kota.

Setiap kali operator berhasil mengisi data dengan benar dan tepat waktu, sistem memberi poin dan badge (misalnya “Data Lengkap Minggu Ini”).

Poin yang terkumpul bisa ditukar dengan:

1. akses prioritas ke pelatihan guru,
2. voucher buku anak,

atau tambahan insentif BOP bagi lembaga.

Dashboard juga menampilkan peringkat antar-lembaga tercipta kompetisi sehat yang mendorong semua PAUD/KB lebih tertib administrasi.

2 . Mentoring Digital Antar-Lembaga Mentoring digital antar-lembaga adalah sistem pendampingan yang dilakukan oleh PAUD/KB yang sudah mahir dalam pengelolaan Dapodik kepada lembaga yang masih mengalami kendala. Proses pendampingan dilakukan secara daring melalui grup WhatsApp, Telegram, atau platform lain sehingga lebih fleksibel dan hemat biaya. Metode ini memperkuat kolaborasi horizontal antar-lembaga dan mempercepat pemerataan kemampuan administrasi.

Lembaga yang sudah mahir membantu yang tertinggal.

Cara Pakai & Mekanisme:

1. Dinas membuat grup resmi di WhatsApp/Telegram.

2. Lembaga dengan capaian Dapodik 100% ditunjuk sebagai mentor untuk membantu lembaga yang masih rendah.
3. Mentor memberi panduan sederhana: rekaman video, panduan singkat, atau mendampingi saat lembaga mentee melakukan sinkronisasi data.

Setiap 3 bulan diadakan evaluasi: mentee yang sudah baik bisa menjadi mentor baru membentuk rantai keberlanjutan.

3 . Pojok Dapodik Mobile Pojok Dapodik Mobile adalah layanan keliling berbasis kendaraan yang dirancang khusus untuk membantu pengisian, perbaikan, dan sinkronisasi data Dapodik di wilayah yang sulit dijangkau jaringan internet atau memiliki keterbatasan SDM. Mobil ini dilengkapi perangkat teknologi (laptop, modem, printer) serta petugas ahli yang memberikan layanan sekaligus melatih operator setempat.

Mobil layanan keliling khusus administrasi Dapodik.

Cara Pakai & Mekanisme:

1. Dinas memodifikasi mobil (seperti perpustakaan keliling) dengan perangkat: laptop, modem internet, dan printer.
2. Mobil ini keliling sesuai jadwal ke daerah sulit jaringan, seperti Mentawai dan Dharmasraya.
3. Operator lembaga membawa data mentah (formulir siswa, guru, dll.) kemudian teknisi di mobil membantu input dan sinkronisasi langsung.

Sambil melayani, teknisi juga melatih operator agar mandiri di kunjungan berikutnya.

4 . Parent Involvement Data Program Parent Involvement Data Program adalah strategi melibatkan orang tua peserta didik dalam memastikan kelengkapan dan akurasi data Dapodik. Melalui formulir daring atau aplikasi sederhana, orang tua dapat membantu menginput dan memperbarui data dasar anak. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban operator, tetapi juga membangun kesadaran orang tua tentang pentingnya data yang valid untuk keberlangsungan pendidikan anak.

Mengajak orang tua ikut memastikan data anak akurat.

Cara Pakai & Mekanisme:

1. PAUD/KB membuat formulir sederhana berbasis Google Form atau aplikasi lokal.
2. Orang tua diminta mengisi atau memperbarui data dasar (nama anak, alamat, kontak, kehadiran) melalui ponsel mereka.

Data ini otomatis masuk ke sistem operator operator tinggal memeriksa dan mensinkronkan ke Dapodik.

Sekolah bisa memberi apresiasi sederhana (misalnya “Orang Tua Teladan Data”) bagi yang paling cepat dan akurat.

5 . Sertifikasi Operator PAUD & KB Sertifikasi Operator PAUD & KB adalah program resmi untuk meningkatkan profesionalisme operator Dapodik melalui pelatihan, evaluasi, dan pemberian sertifikat kompetensi. Dengan adanya pengakuan formal, operator akan merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab dalam menjaga mutu administrasi. Sertifikasi ini juga dapat dijadikan dasar pemberian insentif atau jenjang karier.

Memberikan pengakuan resmi terhadap keahlian operator.

Cara Pakai & Mekanisme:

1. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan lembaga pelatihan membuat kurikulum singkat tentang administrasi Dapodik.
2. Operator mengikuti pelatihan kemudian diuji keterampilannya.

Lulusan mendapat sertifikat kompetensi yang berlaku beberapa tahun.

Operator bersertifikat menjadi prioritas untuk kenaikan insentif atau promosi sebagai tenaga administrasi tetap memacu semangat profesionalisme.

Berdasarkan kelima solusi di atas, saya menilai bahwa kunci utama keberhasilan pengelolaan Dapodik bukan hanya pada sistemnya, tetapi pada manusia yang menjalankannya. Dapodik bukan sekadar kumpulan data, melainkan representasi mutu lembaga secara keseluruhan. Karena itu, inovasi yang menekankan aspek motivasi, kolaborasi, dan penghargaan akan jauh lebih efektif dibanding sekadar menambah regulasi teknis.

Menurut saya, inti dari permasalahan Dapodik bukan terletak pada kurangnya alat atau teknologi, tetapi pada pola pikir dan budaya kerja di lembaga PAUD dan KB. Selama data masih dianggap sekadar kewajiban administratif, maka kualitasnya akan terus bermasalah. Namun, jika lembaga mulai memandang data sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan peningkatan mutu layanan, maka perubahan akan terjadi dari dalam. Saya meyakini bahwa dengan penerapan langkah-langkah inovatif seperti gamifikasi, mentoring, dan sertifikasi operator, Sumatera Barat dapat menjadi contoh bagaimana teknologi pendidikan diterapkan dengan pendekatan manusiawi dan sesuai dengan konteks sosial-budayanya.

Dengan demikian, penguatan sistem Dapodik bukan hanya untuk memenuhi laporan tahunan, tetapi juga menjadi strategi keberlanjutan mutu pendidikan anak usia dini. Solusi ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari kelengkapan data, melainkan juga dari sejauh mana data tersebut digunakan untuk menghadirkan layanan yang berpihak pada perkembangan anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dapodik memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola lembaga PAUD dan KB, terutama melalui penyediaan data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai kendala seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya kompetensi operator, serta lemahnya supervisi berdampak langsung pada mutu layanan dan efektivitas perencanaan lembaga. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas administrasi berbasis data menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan lembaga PAUD dan KB, sekaligus memengaruhi kelancaran akreditasi, penyaluran dana, dan penyusunan program pengembangan. Meskipun demikian, hasil kajian juga mengindikasikan adanya peluang perbaikan melalui inovasi pengelolaan administrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi informasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup analisis yang belum mencakup seluruh variasi kondisi geografis, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji kesesuaian model penguatan administrasi Dapodik di berbagai karakteristik wilayah lainnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar lembaga PAUD dan KB memperkuat budaya administrasi berbasis data melalui peningkatan kompetensi operator dan penerapan kerja kolaboratif dalam pengelolaan Dapodik. Pemerintah daerah diharapkan memberikan pendampingan teknis secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan layanan digital dan supervisi yang lebih terstruktur agar pelaporan data berjalan konsisten dan tepat waktu. Pemerintah pusat perlu terus mengembangkan sistem Dapodik yang adaptif terhadap kondisi lapangan serta memberikan penghargaan bagi lembaga yang tertib administrasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Selain itu, peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji efektivitas inovasi pengelolaan Dapodik dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam agar dapat memperkaya teori manajemen berbasis data dalam konteks pendidikan anak usia dini.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF. (2023). *Laporan Akreditasi PAUD dan PNF 2023*. Jakarta: BAN PAUD dan PNF.
- BAN PAUD dan PNF. (2023). *Panduan Akreditasi Lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal Tahun 2023*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF.
- Datnow, A., & Hubbard, L. (2019). *Data-Driven Leadership*. New York: Routledge.

- Depdikbud. (2014). *Standar Nasional PAUD*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ismaniar. (2021). *Pendidikan Nonformal dan Penguatan Pendidikan Keluarga*. Padang: Sukabina Press.
- Kemendikbudristek. (2023). *Panduan Teknis Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan Dikmas*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah.
- Kemendikbudristek. (2024). *Rekapitulasi Data Dapodik PAUD Sumatera Barat Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lodge, M., & Hood, C. (2019). *Accountability and Transparency in Public Administration*. Oxford: Oxford University Press.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nirmayanti, L. (2020). *Manajemen dan Penguatan Kelembagaan PAUD*. Padang: UNP Press.
- PAUD Citra Bunda Kabupaten Solok. (2024). *Laporan Internal Pengelolaan Data Dapodik Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024*. Solok: PAUD Citra Bunda.
- Permendikbud. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Dapodik)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Putri, L. D., Rozi, M. F., Handrianto, C., & Rahman, M. A. (2024). A conceptual family partnership model with PAUD institutions in developing the potential of early children based on blended learning. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 32(125), 1–16. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362024000100001>
- Rahmawati, D. (2022). Analisis kendala implementasi Dapodik pada lembaga PAUD di wilayah terpencil. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 9(2), 115–127.
- Rahayu, D., & Pratama, R. (2021). Digitalisasi administrasi di lembaga PAUD. *Jurnal Kependidikan*, 10(2), 99–109.
- Rochmad. (2021). *Manajemen Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sari, N., & Andriani, F. (2023). Optimalisasi pendataan Dapodik dalam meningkatkan mutu kelembagaan PAUD. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 145–156.
- Sari, N., & Hidayat, A. (2022). Penguatan administrasi berbasis teknologi untuk peningkatan mutu PAUD di era digital. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4213–4225. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.1948>

- Santrock, J. W. (2018). *Life-Span Development* (16th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Suryana, D. (2020). *Manajemen PAUD dalam Perspektif Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.